

Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi di Indonesia

Rasji¹ Glenn Kevin Cailla² Gabriela Gunawan³

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: rasji@fh.untar.ac.id¹ glenn.205230132@stu.untar.ac.id²
gabriela.205230343@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Dari sudut pandang strategis, Mahkamah Konstitusi (MK) bertanggung jawab menjaga kedaulatan hukum dan keseimbangan kekuasaan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana MK menjaga prinsip supremasi konstitusi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dan dokumen resmi. Teknik analisis data mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi melalui pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara, penafsiran konstitusi, dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun, MK juga menghadapi tantangan seperti keterlambatan penyelesaian perkara, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menghambat efektifitasnya dalam menjaga supremasi konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Supremasi Konstitusi, Hukum Indonesia

Abstract

From a strategic perspective, the Constitutional Court (MK) is responsible for maintaining the rule of law and the balance of power in Indonesia. This study aims to determine how the Constitutional Court maintains the principle of constitutional supremacy in Indonesia. The method used is a qualitative method with a literature study approach. The data used are secondary data from books, journals, and official documents. The data analysis technique refers to the interactive model of Miles and Huberman, which includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that the Constitutional Court has an important role in maintaining the supremacy of the constitution through testing laws, resolving disputes over the authority of state institutions, interpreting the constitution, and ensuring that government policies are in accordance with the principles of democracy and human rights. However, the Constitutional Court also faces challenges such as delays in resolving cases, limited resources, political intervention, and low public awareness, which hinder its effectiveness in maintaining the supremacy of the constitution.

Keywords: Constitutional Court, Supremacy of the Constitution, Indonesian Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Supremasi konstitusi merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum (*rechtsstaat*) yang menegaskan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi. Dalam konteks ini, semua tindakan pemerintah dan masyarakat harus berlandaskan pada ketentuan konstitusi, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara. Supremasi konstitusi tidak hanya menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi juga memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan dalam batasan yang ditetapkan oleh konstitusi itu sendiri. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua tindakan harus mengikuti aturan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar konstitusi.¹

¹ Johannes Suhardjana, "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 257-69, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.

Lebih jauh, supremasi konstitusi mencerminkan kedaulatan rakyat, di mana legitimasi konstitusi berasal dari persetujuan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem demokratis, konstitusi berfungsi sebagai perjanjian sosial yang mengatur relasi terkait pemerintah dan warga negara, serta membagi kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Penerapan prinsip ini harus diwujudkan dalam praktik, dengan adanya lembaga seperti Mahkamah Konstitusi yang bertugas mengawasi dan menegakkan supremasi konstitusi. Dengan demikian, supremasi konstitusi menjadi landasan bagi pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab, serta melindungi hak-hak asasi manusia setiap individu.²

Mahkamah Konstitusi (MK) punya peran penting untuk menjaga agar hukum tetap ditegakkan dan kekuasaan di Indonesia tetap seimbang. MK adalah lembaga peradilan yang bertugas memeriksa apakah undang-undang sudah sesuai dengan UUD 1945. Tugas MK juga memastikan agar kebijakan pemerintah tidak bertentangan dengan konstitusi. Beberapa kewenangan MK yaitu menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, membubarkan partai politik, dan menangani sengketa hasil pemilu. Jadi, MK berfungsi sebagai pelindung konstitusi, artinya MK tidak hanya menjaga hukum, tapi juga melindungi hak-hak rakyat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang berkuasa.³ Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk mencegah lembaga-lembaga negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memperoleh kekuasaan yang berlebihan. Sistem kontrol dan keseimbangan dalam demokrasi sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas politik dan hukum. MK memberikan konsensus berdasarkan konstitusi dan bertindak sebagai mediator dalam perselisihan antar lembaga. Karena itu, keberadaan MK sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan semua tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.⁴

Penegakan supremasi konstitusi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu isu utama adalah adanya UU yang bertentangan dengan UUD 1945, yang sering kali diabaikan oleh pemerintah, menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Intervensi politik juga memperburuk situasi, di mana keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya mengikat sering kali tidak dilaksanakan, terutama jika bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. Selain itu, lemahnya pemahaman masyarakat tentang fungsi konstitusi menambah kompleksitas masalah ini, karena banyak orang tidak menyadari hak-hak mereka atau cara untuk menuntut. Beberapa putusan MK yang kontroversial, seperti yang berkaitan dengan UU KPK, menunjukkan bahwa meskipun MK memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang yang tidak konstitusional, implementasi keputusan tersebut sering kali terhambat oleh resistensi dari lembaga eksekutif dan legislatif⁵. Dengan demikian, studi tentang peran Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk memahami seberapa efektif MK menjalankan fungsinya dalam sistem hukum Indonesia. Melalui penelitian ini, kita dapat menilai kontribusi MK dalam menjaga konsistensi antara sistem hukum yang ada dengan konstitusi yang berlaku. Selain itu, studi ini juga memberikan kesempatan untuk mengkritisi dan mengapresiasi peran MK dalam dinamika ketatanegaraan di Indonesia, sehingga kita dapat lebih menghargai posisi MK dalam mempertahankan hukum yang pasti dan berkeadilan di Indonesia.

² Lestari Wulandari, Biloka Tanggahma, and Rivaldhy, "Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9456–68.

³ Adi Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia," *Universitas Dharmawangsa* 18, no. 4 (2024): 1451–62.

⁴ Juwai Riyah, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara," *Justices: Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 76–85.

⁵ Ali Ukasah, "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia," *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 200–210, <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879>.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam artikel ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi?
2. Bagaimana Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Perannya sebagai Penjaga Konstitusi?
3. Bagaimana Upaya Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Budaya Konstitusional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan jenis penelitian studi pustaka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi peran Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan supremasi konstitusi di Indonesia. Studi pustaka ini dilakukan dengan mengkaji dan menghimpun berbagai sumber data sekunder yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, serta dokumen dan informasi dari website resmi yang menjadi dasar argumentasi dalam penelitian. Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan sesuai fokus kajian, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dianalisis lebih lanjut, dan akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi menjalankan perannya dalam menjamin tegaknya prinsip supremasi konstitusi di tengah dinamika sistem ketatanegaraan Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menegakkan Prinsip Supremasi Konstitusi

Fungsi khusus yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia adalah melindungi prinsip supremasi konstitusi. Sebagai lembaga peradilan yang independen, Mahkamah Konstitusi (MK) bertugas memastikan bahwa setiap aturan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan apa yang diatur dalam UUD 1945. Situasi ini memberikan tugas kepada MK untuk melindungi konstitusi dengan memeriksa peraturan yang dianggap bertentangan dengannya dan melindungi hak konstitusional masyarakat. Hal ini tercantum dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, yang memberi kewenangan pada MK dalam melaksanakan pemeriksaan hukum.⁶ Menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi adalah salah satu tugas utama MK. Individu, kelompok masyarakat, atau lembaga negara dapat mengajukan permohonan untuk memeriksa undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional mereka. Jika MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, undang-undang tersebut dapat dibatalkan. Tindakan ini tidak hanya melindungi hak asasi manusia tetapi juga memastikan bahwa semua produk legislasi sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.⁷

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) juga membereskan masalah kewenangan antar lembaga negara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam sistem politik yang mengedepankan prinsip checks and balances, keberadaan MK sangat krusial untuk memastikan bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki kekuasaan yang dalam. Ketika terjadi perselisihan mengenai batas atau pelaksanaan kewenangan antar lembaga

⁶ Info Hukum, "Mahkamah Konstitusi: Tugas Dan Kewajiban," Info Hukum, 2023, <https://fahum.umsu.ac.id/info/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>.

⁷ Muhammad Sofian and Fuad Fuad, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negera Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945," *Jurnal Humanity*, 2024, 12–23, <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.

negara, MK berfungsi sebagai penengah yang memberikan putusan final dan mengikat, sehingga mencegah terjadinya konflik berkepanjangan yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan memutuskan perkara-perkara semacam ini, MK tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap stabilitas politik dan hukum di Indonesia⁸. Kemudian, interpretasi konstitusi merupakan aspek penting dari peran MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika terdapat pasal-pasal dalam UUD 1945 yang bersifat ambigu atau menimbulkan multitafsir, MK memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi resmi terhadap ketentuan tersebut. Kewenangan ini sangat krusial karena membantu mencegah terjadinya penafsiran yang keliru, baik oleh lembaga negara maupun masyarakat, yang pada akhirnya dapat berujung pada pelanggaran prinsip-prinsip konstitusional.⁹ Melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, MK mampu menyajikan arah yang jelas mengenai bagaimana suatu norma konstitusional harus dipahami dan diterapkan.

Kemandirian Mahkamah Konstitusi (MK) sangat penting untuk menjaga supremasi hukum di Indonesia. MK memiliki wewenang untuk membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi demi melindungi hak dan kebebasan setiap warga negara. Keputusan MK tidak hanya mempengaruhi sistem hukum, tetapi juga melindungi hak pribadi dan memastikan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.¹⁰ Oleh karena itu, MK bertanggung jawab dalam menjaga prinsip supremasi konstitusi. Tugas MK mencakup pengujian undang-undang, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, dan penafsiran terhadap konstitusi guna memastikan bahwa hukum tetap menjadi landasan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, MK memegang peran penting dalam menegakkan keadilan serta hak asasi manusia di Indonesia.

Tantangan Mahkamah Konstitusi dalam Menjalankan Perannya sebagai Penjaga Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam menjalankan perannya sebagai penjaga konstitusi. Salah satu tantangannya yaitu keterlambatan dalam proses penyelesaian kasus. Banyak perkara yang seharusnya dapat diselesaikan dengan cepat, namun sering mengalami penundaan yang berkepanjangan. Keterlambatan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum pada pihak yang ikut serta, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Beban kerja yang tinggi dan meningkatnya jumlah kasus yang masuk menjadi faktor penyebab utama dari masalah ini¹¹. Selain keterlambatan, MK juga menghadapi kekurangan sumber daya yang berdampak pada efisiensi kerja lembaga. Keterbatasan ini mencakup kurangnya tenaga kerja terlatih dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses penanganan kasus. Dalam situasi di mana jumlah permohonan uji materi terus meningkat, penting bagi MK untuk memiliki dukungan yang cukup agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Tanpa adanya peningkatan dalam hal sumber daya, MK berisiko tidak mampu memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan kepastian hukum.¹²

Intervensi politik merupakan tantangan signifikan bagi independensi Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Tekanan dari lembaga eksekutif dan legislatif sering kali

⁸ Siti Tiara Maulia Diea Amiliya, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia," *Causa 4*, no. 10 (2024): 1-23.

⁹ Putra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia."

¹⁰ Wulandari, Tanggahma, and Rivaldhy, "Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara."

¹¹ Lidia Pratama Febian, "Mahkamah Konstitusi Hadapi Berbagai Tantangan: Krisis Kewenangan Dan Legitimitas," *Kumparan.com*, 2024, <https://kumparan.com/lidiapratamafebian/mahkamah-konstitusi-hadapi-berbagai-tantangan-krisis-kewenangan-dan-legitimitas-22tNO9I2DDo>.

¹² Eka Pirdia Wanti, "Mahkamah Konstitusi Dan Dinamika Studi Konstitusi," *BPMPP*, 2025, <https://bpmp.uma.ac.id/2025/02/01/mahkamah-konstitusi-dan-dinamika-studi-konstitusi-tantangan-serta-prospek-di-era-demokrasi/>.

mempengaruhi proses pengambilan keputusan di MK, yang seharusnya bersifat netral dan objektif. Sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menguji konstiusionalitas UU, MK seharusnya bebas dari pengaruh luar agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Namun, dalam praktiknya, intervensi politik tidak dapat dihindari, baik dalam proses rekrutmen hakim konstitusi maupun dalam pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai kredibilitas MK sebagai penjaga konstitusi, dan ketidakpastian ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap putusan-putusan yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.¹³ Implementasi putusan MK juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun putusan MK bersifat final dan mengikat, sering kali keputusan tersebut tidak segera dilaksanakan oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Beberapa keputusan bahkan diabaikan, menciptakan kesenjangan antara hukum dan praktik. Situasi ini menunjukkan perlunya regulasi yang lebih tegas agar setiap putusan MK dihormati dan dijalankan oleh seluruh lembaga negara. Tanpa adanya kepatuhan terhadap putusan MK, supremasi konstitusi akan sulit terwujud, dan ini dapat merugikan hak-hak konstiusional warga negara.¹⁴ Oleh sebab itu, sangat penting bagi semua pihak untuk menghormati independensi Mahkamah Konstitusi (MK) dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar mendorong terciptanya keadilan serta penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat tentang peran dan fungsi MK menjadi tantangan yang harus diatasi. Minimnya partisipasi publik dalam pengawasan implementasi konstitusi berkontribusi pada kurangnya pemahaman mengenai hak-hak konstiusional mereka. Oleh karena itu, edukasi konstiusional bagi masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka lebih memahami peran MK dan hak-hak mereka sebagai warga negara¹⁵. Dengan langkah-langkah strategis ini, diharapkan MK dapat terus berkontribusi dalam menjaga supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia.

Upaya Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Budaya Konstiusional di Indonesia

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam memperkuat budaya konstitusi di Indonesia. Sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab menjaga konstitusi, MK tidak hanya menilai apakah suatu undang-undang sesuai dengan konstitusi, tetapi juga melindungi hak-hak dasar warga negara melalui pengujian undang-undang. Jika ada undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, MK bisa membatalkannya. Dengan cara ini, MK memastikan hak asasi manusia dan demokrasi tetap terjaga dari pengaruh keputusan politik dan legislatif. Ini merupakan langkah besar untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan transparan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁶ Selain itu, MK juga aktif dalam menyelesaikan sengketa pemilu. Proses pemilihan umum adalah salah satu pilar utama demokrasi, dan MK berperan sebagai lembaga yang menegakkan keadilan dalam proses tersebut. Dengan menangani berbagai kasus sengketa hasil pemilu, MK membantu memastikan bahwa suara rakyat dihargai dan diakui. Misalnya, dalam beberapa pemilu sebelumnya, MK telah memutuskan sejumlah sengketa yang melibatkan calon legislatif dan kepala daerah, memberikan putusan yang berkeadilan sesuai dengan bukti dan argumentasi hukum yang kuat. Melalui tindakan ini, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak hanya memastikan kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu, tetapi juga memperkuat keyakinan masyarakat terhadap jalannya proses demokrasi.¹⁷ Upaya lain yang dilakukan oleh

¹³ Fajarwati, "Intervensi Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Rechtvinding*, 2016, 1–6.

¹⁴ Mahkamah Konstitusi RI, "Dosen Dan Mahasiswa Persoalkan Intervensi Politik Kepada LPS," Mahkamah Konstitusi RI, 2024, <https://testing.mkri.id/berita/dosen-dan-mahasiswa-persoalkan-intervensi-politik-kepada-lps-21374>.

¹⁵ Febian, "Mahkamah Konstitusi Hadapi Berbagai Tantangan: Krisis Kewenangan Dan Legitimitas."

¹⁶ Rahayu Prasetianingsih, "Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 160–77, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.

¹⁷ Ashfiya Nur Atqiya et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS, Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendiidkan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 302–13, <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.

MK adalah melalui program pendidikan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat. Mahkamah Konstitusi (MK) menyadari bahwa penting bagi warga negara untuk memahami hak-hak konstitusional mereka agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam demokrasi. Untuk itu, MK menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti penyuluhan hukum, lokakarya, dan seminar, yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk lebih berani menuntut keadilan saat hak mereka dilanggar. Pendidikan hukum yang diberikan oleh MK juga berfungsi untuk mengurangi kesenjangan pengetahuan hukum antara masyarakat umum dan elit politik¹⁸.

MK juga berupaya memperkuat budaya konstitusional melalui keterlibatan dalam dialog dan kerjasama dengan berbagai lembaga negara lainnya. Dalam konteks ini, MK sering kali bekerja sama dengan lembaga legislatif dan eksekutif untuk membahas isu-isu penting terkait penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan membangun komunikasi yang baik antar lembaga negara, MK berkontribusi pada penciptaan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, kolaborasi ini juga membantu menciptakan kesepahaman tentang pentingnya penghormatan terhadap konstitusi di semua level pemerintahan.¹⁹ Dalam upaya melindungi hak asasi manusia, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menjalankan berbagai tindakan penting guna menjunjung tinggi nilai-nilai HAM dalam setiap putusan yang dikeluarkannya. Contohnya adalah keputusan-keputusan yang membatalkan beberapa ketentuan dalam undang-undang yang dianggap diskriminatif atau melanggar hak asasi manusia. Keputusan-keputusan ini menunjukkan komitmen MK untuk melindungi kebebasan individu dan mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif. Dengan menegaskan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam setiap putusan, MK turut memperkuat budaya konstitusional di Indonesia²⁰.

Dengan demikian, upaya Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat budaya konstitusional tidak terlepas dari tantangan yang dihadapi. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai, masih ada tantangan seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan tekanan politik terhadap independensi lembaga peradilan. Namun, dengan komitmen kuat untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia, MK terus berupaya menjadi garda terdepan dalam menjaga konstitusi Indonesia. Melalui berbagai inisiatif dan programnya, MK tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi tetapi juga berkontribusi pada pembentukan budaya hukum yang kuat di Indonesia. Dengan segala upaya tersebut, Mahkamah Konstitusi Indonesia menunjukkan dedikasinya untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Melalui judicial review, penyelesaian sengketa pemilu, pendidikan hukum, kolaborasi antar lembaga negara, perlindungan hak asasi manusia, serta komitmen terhadap independensi lembaga peradilan, MK berperan aktif dalam memperkuat budaya konstitusional di Indonesia. Keberadaan MK sebagai lembaga independen sangat penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi tetap terjaga dan dihormati oleh semua elemen masyarakat.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran menegakkan supremasi konstitusi melalui judicial review, penyelesaian sengketa antar lembaga negara, dan interpretasi konstitusi, memastikan kebijakan sesuai dengan demokrasi, hak asasi manusia, dan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun disamping itu, Mahkamah

¹⁸ Hani Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130-46, <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.

¹⁹ Atqiya et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia."

²⁰ Adhani, "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi."

Konstitusi menghadapi tantangan seperti keterlambatan penyelesaian perkara, keterbatasan sumber daya, intervensi politik, lemahnya implementasi putusan, dan rendahnya kesadaran masyarakat, yang menghambat perannya dalam menegakkan supremasi konstitusi. Dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi memperkuat budaya konstitusional di Indonesia melalui judicial review dengan membatalkan UU yang bertentangan dengan UUD 1945, penyelesaian sengketa pemilu, pendidikan hukum, kolaborasi antar lembaga, perlindungan hak asasi manusia, dan menjaga independensi peradilan untuk menegakkan nilai-nilai demokrasi dan keadilan. Sebagai saran, Mahkamah Konstitusi perlu meningkatkan transparansi proses, memperkuat sumber daya, dan memperluas edukasi publik mengenai pentingnya supremasi konstitusi dalam menjaga demokrasi dan keadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis, Glenn Kevin Cailla dan Gabriela Gunawan mengucapkan terima kasih yang ditujukan kepada Prof. Dr. Rasji S.H., M.H. selaku dosen mata kuliah Litigasi Kenegaraan kelas C Semester 4 Tahun 2025 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan dukungan dalam proses pengerjaan artikel ini. Dengan pemberian tugas artikel ini, kami menjadi lebih terlatih dalam membuat karya ilmiah dan dapat membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang kami miliki dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Hani. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 130–46. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>.
- Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, and Muhana Ayu Devita. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan Di Indonesia Pascasarjana Universitas Sebelas Maret , Indonesia Program Doktor Ilmu Hukum UNS , Indonesia." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendiidkan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 6 (2024): 302–13. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.
- Diea Amiliya, Siti Tiara Maulia. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia." *Causa* 4, no. 10 (2024): 1–23.
- Fajarwati. "Intervensi Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Rechtvinding*, 2016, 1–6.
- Febian, Lidia Pratama. "Mahkamah Konstitusi Hadapi Berbagai Tantangan: Krisis Kewenangan Dan Legitimitas." *Kumparan.com*, 2024. <https://kumparan.com/liidiapratamafebrian/mahkamah-konstitusi-hadapi-berbagai-tantangan-krisis-kewenangan-dan-legitimitas-22tNO9I2DDo>.
- Hukum, Info. "Mahkamah Konstitusi: Tugas Dan Kewajiban." *Info Hukum*, 2023. <https://fahum.umsu.ac.id/info/mahkamah-konstitusi-tugas-dan-kewajiban/>.
- Prasetianingsih, Rahayu. "Judicial Activism in Indonesia: Constitutional Culture by the Constitutional Court." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah* 5, no. 2 (2020): 160–77. <https://doi.org/10.22373/petita.v5i2.106>.
- Putra, Adi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Stabilitas Hukum Di Indonesia." *Universitas Dharmawangsa* 18, no. 4 (2024): 1451–62.
- RI, Mahkamah Konstitusi. "Dosen Dan Mahasiswa Persoalkan Intervensi Politik Kepada LPS." *Mahkamah Konstitusi RI*, 2024. <https://testing.mkri.id/berita/dosen-dan-mahasiswa-persoalkan-intervensi-politik-kepada-lps-21374>.
- Riyah, Juwai. "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara." *Justices : Journal of Law* 3, no. 2 (2024): 76–85.

- Sofian, Muhammad, and Fuad Fuad. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Negera Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Sosial Berdasarkan UUD 1945." *Jurnal Humanity*, 2024, 12–23. <https://doi.org/10.37631/jrkhm.v3i2.43>.
- Suhardjana, Johannes. "Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara." *Jurnal Dinamika Hukum* 10, no. 3 (2010): 257–69. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.96>.
- Ukasah, Ali. "Tantangan Implementasi Demokrasi Dalam Konteks Negara Konstitusi: Studi Kasus Pada Sistem Hukum Indonesia." *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 2 (2024): 200–210. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1879>.
- Wanti, Eka Pirdia. "Mahkamah Konstitusi Dan Dinamika Studi Konstitusi." BPMPP, 2025. <https://bpmpp.uma.ac.id/2025/02/01/mahkamah-konstitusi-dan-dinamika-studi-konstitusi-tantangan-serta-prospek-di-era-demokrasi/>
- Wulandari, Lestari, Biloka Tanggahma, and Rivaldhy. "Menguak Esensi: Negara Hukum Dalam Konstitusi: Sebuah Analisis Mendalam Terhadap Perlindungan Hak-Hak Warga Negara." *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 9456–68.